

BAB 1

PENDAHULUAN

Studi identitas teritorial di Indonesia masih belum banyak ditemukan. Di Indonesia sendiri, identitas teritorial lebih berkenan pada identitas nasional atau nasionalisme. Mengacu pada pandangan Knight (1982), ia meluruskan identitas teritorial dalam dua identitas yaitu, identitas nasional dan identitas regional. Identitas nasional sendiri berkenan pada *state society*, sementara identitas regional ditemui dalam ranah *local society* (*urban society* dan *rural society*). Dengan demikian, esensi identitas teritorial lebih mengarah pada mobilisasi integrasi dalam bidang sosial sampai pada politik suatu negara ataupun antar negara (Jensen dan Richardson, 2002).

Dalam tulisan ini, kajian identitas teritorial kemudian digunakan. Identitas teritorial dalam tulisan ini berkenan pada identitas regional atau lebih kepada *rural community*. Berangkat pada studi-studi terdahulu, identitas teritorial bertemakan integrasi masyarakat dalam suatu wilayah (regional) sebagaimana telah banyak digunakan sebagai analisa manajemen teritorial di Eropa. Sebagaimana, Luminita Filimon et al (2014) dalam studi mereka, mengangkat identitas teritorial sebagai landasan pembangunan bercorak *bottom-up* berintegrasi dengan eksistensi warisan baik secara immaterial maupun material di pedesaan Rumania. Selanjutnya, Roca (2012) mengangkat tema *sense of belonging* dalam memperkenalkan identitas teritorial meliputi aspek *terraphilia* dan *topophilia* pada pedesaan di Portugal. Berikut pula, Veneri (2011) yang mengelaborasi modal teritorial di Italia dalam hal integrasi masyarakat pedesaan. Kemudian juga, Thuesen dan Nielsen (2014) menggunakan kajian keorganisasian, dalam hubungan lima desa di Denmark melalui pendekatan identitas teritorial berdasar pada fungsional agen yang merancang pembangunan pedesaan dan juga sebagai partner pemerintah melalui *Local Action Group's* (LAGs).

Keseluruhan studi tersebut di atas menaruh perhatian pada pendekatan identitas teritorial yang lebih regional, menyangkut warisan, gaya hidup, SDA, organisasi, modal teritorial, maupun rasa memiliki. Sementara pada kehidupan masyarakat tradisional di Maluku, semangat regional masih mewarnai ruang-ruang relasi bermuatan tradisional melalui budaya maupun tradisi. Apabila di Indonesia identitas fundamental terbentuk melalui pemaknaan Pancasila. Di Maluku¹, identitas teritorial (regional) hadir melalui pemaknaan mitos yang disebut *Nusa Ina* (Pulau Ibu atau Pulau Seram) yang di dalamnya *Nunusaku* (mitos) berada. Pulau Ibu merepresentasikan identitas teritorial yang hadir melalui pemaknaan masyarakat Maluku (terkhususnya Pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusa Laut) tentang tempat dimana mereka berasal.

Dengan demikian, identitas teritorial dipandang sebagai *co-simulated*. Pemahaman *co-simulated* sendiri memberi kesan bagi kesamaan kolektif yang dimiliki masyarakat pada satu domain tertentu, dalam hal mempertahankan aset *spiritual identity*² mereka (Flora, 2011 dalam Filimon et al, 2014). Selain itu, identitas teritorial identik dengan perasaan yang memiliki kesamaan oleh sekelompok orang yang mendefinisikan wilayah mereka, memiliki tujuan bersama, maupun hubungan baik secara institusi dan sistem ekonomi³.

Latar Belakang

Tulisan ini mengangkat studi tentang identitas teritorial salah satu masyarakat tradisional di Pulau Seram, Maluku. Masyarakat ini hidup dalam sebuah *negri*⁴ yang dinamakan Hatunuru. *Negri* Hatunuru

¹ Terkhususnya Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, dan Seram

² *Spiritual identity* adalah kekayaan masyarakat sipil melalui spiritual capital, tercermin melalui identitas, perilaku, interaksi sosial, maupun peran iman (Montemaggi, 2011)

³ <http://www.megaessays.com/viewpaper/22608.html>

⁴ *Negri* merupakan nama lain dari desa. *Negri* menjadi salah satu tonggak pemerintahan aras bawah dalam struktur pemerintahan di Maluku. Hal ini diatur dalam PERDA Provinsi Maluku Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Penyerahan Urusan Pembantu Pemerintahan Provinsi kepada *Negri/Negri* Administratif. Ketentuan UU RI Nomor: 32 Tahun 2004, bertumpu pada landasan pemikiran tentang pengaturan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan

terletak pada wilayah pesisir di Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (selanjutnya penulis singkat, SBB), Provinsi Maluku. Kendati terletak pada wilayah pesisir, namun masyarakat Hatunuru tidak sama sekali bersentuhan dengan laut atau tidak menggunakan laut sebagai sumber nafkah melainkan hutan. Kehidupan masyarakat Hatunuru tentu sangat paradoksal dengan kondisi geografis sebenarnya, hal ini terwujud melalui kehidupan atau gaya hidup keseluruhan masyarakat Hatunuru sebagai petani hutan pada wilayah pesisir, dan bukan nelayan. Warisan material dan kultural sangat menonjol dalam keterkaitannya dengan sumber nafkah yaitu, dependensi terhadap hutan dan sesama masyarakat Hatunuru.

Dalam pemaknaan warisan material, hutan adalah menjadi penting sebagai sentra ekonomi, sama halnya dengan pemaknaan warisan kultural bahwa petani hutan adalah agen ekonomi dalam memanfaatkan SDA di hutan. Sehingga ada hubungan antara hutan dan masyarakat Hatunuru sebagai kesatuan kosmis yang dalam kosmologi masyarakat Hatunuru, hutan dianggap atau dimaknai sebagai “dapur”. Kata “dapur” dalam pemaknaan masyarakat Hatunuru adalah tempat yang saling memberdayakan, tempat yang di dalamnya terdapat institusi, dan paling penting adalah sebagai ruang hidup dan arena keberlanjutan.

Ketika hutan terancam oleh hegemoni Pemerintah Kabupaten SBB, dan Pemerintah Kecamatan Taniwel Timur, maupun para raja di *negri-negri* di Taniwel Timur (selanjutnya penulis sebut, para elite SBB) yang merencanakan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Hatunuru, maka masyarakat Hatunuru melakukan resistensi. Alasan melakukan resistensi, adalah karena keterancaman sumber nafkah. Resistensi yang dilakukan masyarakat Hatunuru bukan lalu bermuatan *everyday resistance*, tetapi lebih elegan dan frontal, sebagaimana melakukan perlawanan berdasar pada kekuasaan, etika, dan berbasis solidaritas. Selain itu, ada upaya menghimpun masyarakat *negri* lainnya di Taniwel Timur dalam hal memberi dukungan, kemudian

masyarakat. Sebelum Belanda menempati wilayah Maluku, kata Negri lebih dahulu dikenal sebagai *Hena* atau *Aman*. Kemudian beralih menjadi *Regent* ketika intervensi Belanda begitu mendominasi wilayah Maluku. Selanjutnya berganti dengan kata *Negri* sampai sekarang

juga melakukan promosi modal teritorial melalui internet yang tentu saja didukung penuh oleh NGO.

Dengan demikian, tulisan ini mengangkat studi identitas teritorial dalam keterkaitannya dengan resistensi. Identitas teritorial menjadi basis resistensi, berangkat pada perekonomian luar yang dirasakan mengintimidasi identitas teritorial masyarakat Hatunuru terkait hutan sebagai “dapur” atau sumber nafkah. Penelitian yang telah dilakukan ini mengambil pertanyaan payung sebagai rumusan masalah demikian; bagaimana identitas teritorial menjadi landasan bagi resistensi dan sumbangsuhnya bagi penyusunan program pembangunan di Hatunuru?

Penelitian ini berfokus pada identitas teritorial masyarakat Hatunuru, dalam melihat kesatuan modal yang membentuk identitas teritorial melalui hutan (alam), petani hutan (gaya hidup), juga kosmologi. Ketiga hal tersebut menjadi prioritas keberlanjutan sumber nafkah di Hatunuru, dan menjadi basis perlawanan masyarakat Hatunuru berdasar pada identitas teritorial.

Alasan Memilih Identitas Teritorial Sebagai Fokus Kajian

Alasan utama identitas teritorial dipilih sebagai fokus kajian, adalah karena identitas teritorial sendiri meliputi aspek-aspek dalam wilayah. Aspek-aspek itu berkenan pada manusia, alam, ekonomi, kehidupan sosial, kepercayaan, budaya, institusi, kekuasaan, kepengaturan, dan lain sebagainya yang membentuk kesamaan dan tujuan bersama maupun sistem ekonom. Selain itu, resistensi di Hatunuru terjadi karena keterancaman modal teritorial. Sehingga identitas teritorial yang terbentuk oleh pengaruh modal teritorial di Hatunuru adalah landasan kuat untuk melakukan resistensi.

Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, identitas teritorial memberi panduan melalui gaya hidup (fenomenologi) di Hatunuru kepada para pembuat kebijakan untuk menyusun program pembangunan yang sejalan dengan gaya hidup masyarakat Hatunuru juga terkait pengalaman resistensi di Hatunuru. Sehingga tujuan penelitian yang telah dilakukan ini adalah memberi deskripsi dan analisa terhadap identitas teritorial di Hatunuru sebagai landasan

resistensi, dan menjadi pengalaman apabila Pemerintah Kabupaten SBB maupun Pemerintah Daerah di Maluku hendak menyusun program pembangunan. Penelitian ini akan bermanfaat ketika disertakan sebagai referensi terkait hubungan identitas teritorial dan resistensi dalam ranah akademik, juga sebagai referensi dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten SBB maupun Gereja Protestan Maluku (selanjutnya penulis singkat, GPM).

Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan ini terbagi dalam 6 Bab. Pada Bab 1, penulis memberi judul “Pendahuluan”, di dalamnya terkandung pemahaman identitas teritorial secara singkat, latar belakang, alasan memilih identitas teritorial sebagai fokus kajian, dan sistematika penulisan. Pada Bab 2, penulis memberi judul “Hubungan Identitas Teritorial dan Resistensi” sebagai bagian yang bermuatan teoritis. Pada Bab 3, penulis memberi judul “Metode Penelitian”, berisikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada Bab 4, penulis memberi judul “Identitas Teritorial Di Hatunuru”, bagian ini merupakan gambaran umum *Negri* Hatunuru, dan kehidupan masyarakat di Hatunuru. Bab 5 penulis memberi judul “Identitas Teritorial Dan Resistensi Masyarakat Hatunuru”, di dalamnya penulis memberi deskripsi tentang resistensi di Hatunuru, dan menggunakan kajian identitas teritorial juga resistensi dalam melakukan analisa. Bagian 6 merupakan “Penutup”, berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.